

Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai

Financial Inclusion: Case Study of LKD and Laku Pandai Program

Prani Sastiono^{a,*}, & Chaikal Nuryakin^a

^aDepartemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

[diterima: 8 Juli 2019 — disetujui: 29 Juli 2019 — terbit daring: 7 November 2019]

Abstract

This study aims to analyse the inclusion rate of two programs, namely Layanan Keuangan Digital (LKD) and Laku Pandai. We found that inclusion rate of LKD program and Laku Pandai program are 28% and 43% respectively when we define inclusion as use of service (access inclusion). However, the rate falls to 5% and 25% respectively when we define inclusion as account ownership. Laku Pandai program has advantages in increasing financial access of people who live in rural area, have low education, and generate low income. We also found that knowledge/certainty in transaction costs (for LKD) and size of access costs in the form of transaction costs and transportation costs (for Laku Pandai) are important determinants of account ownership.

Keywords: financial inclusion; digital finance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inklusi keuangan dari program Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai. Penulis menemukan bahwa inklusi program LKD dan Laku Pandai berdasarkan penelitian ini mencapai 28% dan 43% apabila inklusi diukur dengan penggunaan layanan (inklusi akses). Namun, inklusi turun ke angka 5% dan 25% apabila inklusi didefinisikan sebagai kepemilikan rekening. Laku Pandai memiliki keunggulan dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat yang tinggal di pedesaan, berpendidikan rendah, dan berpendapatan rendah. Pengetahuan/kepastian biaya transaksi (LKD) dan biaya akses dalam bentuk biaya transaksi dan transportasi (Laku Pandai) merupakan faktor yang penting dalam menentukan kepemilikan rekening keuangan.

Kata kunci: inklusi keuangan; keuangan digital

Kode Klasifikasi JEL: G20; O17

Pendahuluan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap berbagai indikator pembangunan di negara berkembang. Inklusi keuangan tidak saja memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Sarma dan Pais, 2011), tetapi juga meningkatkan inklusi pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan regional

(Hannig dan Jansen, 2010). Akses terhadap layanan keuangan juga memungkinkan masyarakat miskin untuk menabung dan berinvestasi pada kegiatan ekonomi produktif seperti pendidikan dan kegiatan wirausahaan yang memungkinkan masyarakat untuk keluar dari *poverty trap* (Demirguc-Kunt dan Klapper, 2013), terutama bagi perempuan miskin (Swamy, 2014). Selain itu, secara makro, inklusi keuangan juga berkontribusi terhadap kestabilan keuangan suatu negara (Han dan Melecky, 2013).

Walaupun memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,

*Alamat Korespondensi: Gedung Departemen Ilmu Ekonomi Lantai 2, Kampus Widjojo Nitisastro, Jalan Prof. Dr. Sumitro Djohadikusumo, Kampus UI Depok 16424. E-mail: prani@ui.ac.id.

inklusi keuangan masih merupakan tantangan bagi Indonesia. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program keuangan mikro dalam beberapa tahun terakhir, namun 6% dari populasi dunia tanpa akses terhadap layanan keuangan berada di Indonesia. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar ketiga setelah India dan Cina. Bila dibandingkan dengan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) lain, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah masyarakat tanpa rekening bank terendah untuk populasi di atas 15 tahun (*World Bank*, 2014).

Pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 75% yang harus dicapai pada tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program, antara lain program Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai. Untuk meningkatkan angka inklusi keuangan, pada tahun 2014, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dua program terkait layanan perbankan tanpa cabang (*branchless banking*), yaitu LKD dan layanan keuangan tanpa cabang (*branchless banking*) yang dinamakan Laku Pandai. LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi, antara lain *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat yang tidak memiliki dan memiliki akses yang terbatas terhadap layanan keuangan. Sementara, Laku Pandai yang disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif adalah program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Sejak peluncuran LKD melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), sirkulasi uang elektronik berlipat ganda lebih dari

29 kali dari sekitar 3 juta kartu uang elektronik pada tahun 2009 menjadi 90 juta kartu pada tahun 2017, atau setara dengan peningkatan sebesar 60% per tahun. Sementara itu, OJK meluncurkan program Laku Pandai pada tahun 2014 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Pengguna Laku Pandai meningkat lebih dari sebelas kali antara September 2015 hingga September 2017.¹

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan penggunaan LKD dan Laku Pandai adalah keberadaan agen. Jumlah agen Laku Pandai meningkat dari 37 per 100.000 populasi dewasa pada tahun 2015 menjadi 107 per 100.000 populasi dewasa pada tahun 2017, atau naik sebesar 189,2%. Sementara itu, jumlah agen Laku Pandai meningkat 22 kali antara September 2015 dan September 2017, yaitu dari 19.400 agen menjadi 428.000 agen.

Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai inklusi keuangan. Inklusi keuangan dapat diartikan sebagai penggunaan layanan keuangan (*World Bank*, 2009). Sementara itu, definisi menurut *Global Financial Index* lebih berfokus pada kepemilikan dan penggunaan rekening keuangan pada lembaga keuangan formal (Demirguc-Kunt dan Klapper, 2013). Secara spesifik, inklusi keuangan didefinisikan sebagai kepemilikan rekening keuangan dan penggunaan layanan keuangan secara aktif pada waktu tertentu.

Kebanyakan penelitian mengenai inklusi keuangan tidak berfokus pada satu negara, dan merupakan penelitian antar-negara (Demirguc-Kunt *et al.*, 2013; Zins dan Weill, 2016; Akudugu, 2013). Oleh karena itu, kebanyakan penelitian-penelitian tersebut hanya mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan demografi sebagai faktor yang menentukan inklusi finansial. Kalaupun memasukkan variabel penjelas lain seperti biaya dan kualitas pelayanan,

¹Data triwulanan Laku Pandai tersedia dari Juni 2015 hingga September 2017.

variabel tersebut merupakan agregasi di tingkat nasional yang bernilai sama untuk seluruh individu di negara tersebut (Allen *et al.*, 2016). Beberapa penelitian yang berfokus pada inklusi keuangan di negara tertentu, seperti penelitian Fungáčová dan Weill (2015) di Cina dan Marr *et al.* (2014) di Peru juga belum menyertakan faktor biaya dan kualitas pelayanan sebagai faktor yang memengaruhi inklusi keuangan. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Allen *et al.* (2016), kualitas pelayanan yang kurang baik, seperti lemahnya keamanan serta tingginya biaya penggunaan layanan termasuk biaya transportasi, dapat menyebabkan turunnya inklusi keuangan.

Penelitian Allen *et al.* (2016) telah memasukkan unsur persepsi terhadap biaya sebagai faktor yang memengaruhi akses keuangan. Namun, dalam penelitian tersebut biaya diukur dengan persepsi dari bank sentral setiap negara yang bernilai sama untuk setiap individu di negara tersebut. Oleh karena itu, variasi biaya yang dihadapi di tingkat individu tidak terlihat walaupun sampel yang digunakan adalah di tingkat individu. Begitu pula dengan penelitian Cole (2009), bahwa kualitas pelayanan belum diukur pada tingkat individu. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melalui data survei yang diperoleh untuk penelitian ini memungkinkan penulis untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan, termasuk faktor kualitas dan biaya di tingkat individu yang belum dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inklusi keuangan dari program LKD dan Laku Pandai dengan menggunakan dua indikator inklusi keuangan: penggunaan layanan (inklusi akses) dan kepemilikan rekening. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan seperti kualitas layanan, biaya, maupun karakteristik sosial ekonomi.

JEPI Vol. 19 No. 2 Juli 2019, hlm. 242–262

Tinjauan Literatur

Inklusi keuangan memiliki beberapa pengertian dan indikator yang bervariasi. Berdasarkan *Global Financial Inclusion Index*, inklusi keuangan diartikan sebagai kepemilikan rekening pada institusi keuangan formal dan penggunaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, indikator inklusi keuangan adalah jumlah kepemilikan rekening per populasi, serta jumlah penggunaan rekening untuk menabung, menarik uang, transfer, dan pinjaman dalam dua belas bulan terakhir. Definisi dan indikator-indikator inilah yang digunakan dalam banyak penelitian internasional mengenai inklusi keuangan, seperti pada penelitian Allen *et al.* (2016), Demircukunt dan Klapper (2012,2013), dan Fungáčová dan Weill (2015).

Sementara itu, menurut *United Nations* (2016), inklusi keuangan berarti penyediaan layanan keuangan yang terjangkau dan berkelanjutan untuk menarik masyarakat miskin ke dalam ekonomi formal. Inklusi keuangan dimaksudkan untuk memberikan layanan keuangan pada masyarakat yang tidak memiliki akses (miskin) yang dapat dilakukan antara lain dengan membukakan rekening di lembaga keuangan formal sehingga dapat melakukan kegiatan keuangan yang akhirnya dapat memberantas kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Beck *et al.*, 2007; Bruhn dan Love, 2014). Sementara itu, Bank Indonesia mengukur inklusi keuangan dengan menggunakan tiga dimensi yang terdiri atas akses, penggunaan, dan kualitas.

Penelitian ini mencoba untuk mengakomodasi dua dimensi dari inklusi keuangan tersebut, yaitu akses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses (miskin) serta kepemilikan dan penggunaan layanan keuangan. Oleh karena itu, penulis mengestimasi efek inklusi dari program LKD dan Laku Pandai dengan menggunakan presentase pengguna dan pemilik rekening LKD dan Laku Pandai yang sebelumnya tidak memiliki akses ke institusi keuangan formal.

Inklusi Keuangan di Indonesia

Walaupun terdapat sejumlah program keuangan mikro di Indonesia, namun baru 20% dari populasi di atas 15 tahun yang memiliki akses layanan keuangan pada tahun 2011 (*World Bank*, 2014). Untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia, maka pemerintah meluncurkan beberapa program, di antaranya program LKD dan program Laku Pandai.

Inklusi keuangan Indonesia mengalami perbaikan sebagai akibat penerbitan berbagai regulasi tersebut. Populasi di atas 15 tahun yang memiliki akses layanan keuangan naik dari 20% di tahun 2011 menjadi 36% di tahun 2014 dan menjadi 48,9% di tahun 2017. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang paling cepat di antara negara berkembang lainnya di Kawasan Asia Pasifik Selain itu, tidak terdapat *gender gap* dalam kepemilikan rekening keuangan di Indonesia (*World Bank*, 2018).

Walaupun terdapat perkembangan yang pesat dalam inklusi keuangan, namun tingkat inklusi keuangan Indonesia masih di bawah rata-rata tingkat inklusi keuangan negara berkembang secara global yang berada pada angka 57,8%. Dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses keuangan, 33% responden menyatakan bahwa jarak ke institusi keuangan merupakan hambatan akses. Sementara itu, 69% dari populasi ini menyatakan bahwa responden memiliki telepon seluler (*World Bank*, 2018) sehingga terdapat potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan *mobile banking*.

Program Layanan Keuangan Digital

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai uang elektronik pada tahun 2009 berupa PBI No. 11/12/PBI/2009 beserta amandemen pada tahun 2014 dengan PBI No. 16/8/PBI/2014² dan pada

²Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

tahun 2016 dengan PBI No. 18/17/PBI/2016³. Amandemen tersebut memungkinkan lebih banyak bank untuk menyediakan layanan keuangan digital serta meningkatkan batas transaksi untuk penggunaan terdaftar. Pemerintah juga mulai menggunakan fitur uang elektronik untuk distribusi program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya perluasan inklusi keuangan dan pencegahan penyelewengan. Contohnya dengan penggunaan Kartu Keluarga Sehat (KKS) yang diterbitkan Himpunan Bank Negara dalam distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH).

Akibat intervensi tersebut, jumlah agen LKD naik hampir 2 kali lipat dari 69.000 agen di tahun 2015 menjadi 122.000 agen di tahun 2016. Namun, jumlah rekening uang elektronik terdaftar pada agen LKD hanya mengalami kenaikan dari 1,15 juta rekening di tahun 2015 menjadi 1,24 juta tahun 2016 (Bank Indonesia, 2017). Di samping itu, baru 8% dari masyarakat yang mengetahui mengenai provider LKD dan hanya 0,4% dari populasi di atas 15 tahun yang memiliki rekening keuangan digital (*Intermedia*, 2016).

Program Laku Pandai

Selain Bank Indonesia, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, OJK meluncurkan program Laku Pandai yang bertujuan untuk menyediakan layanan rekening tabungan tanpa kantor cabang bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Laku Pandai digunakan untuk penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Mirip dengan efek LKD, Jumlah agen Laku Pandai mengalami kenaikan pesat dari 60.000 agen di tahun 2015 menjadi 160.000 agen di tahun 2016.

³Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Namun, jumlah rekening *outstanding* naik lebih kecil dari proporsi kenaikan agen, yaitu dari 1,2 juta rekening di tahun 2015 menjadi 1,9 juta rekening di tahun 2016 (OJK, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan agen belum terkonversi menjadi kenaikan inklusivitas layanan keuangan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Inklusi Keuangan

Terdapat beberapa faktor sosial-ekonomi dan demografi yang memengaruhi penggunaan layanan keuangan dan kepemilikan rekening keuangan. Orang yang memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi, terdidik, dan lebih tua cenderung memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk memiliki akses keuangan (Sarma, 2011; Allen *et al.*, 2016; Fungáčová dan Weill, 2015; Zins dan Weill, 2016). Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya *gender gap* dalam akses keuangan, bahwa probabilitas perempuan untuk memiliki akses keuangan lebih rendah dari laki-laki (Allen *et al.*, 2016; Fungáčová dan Weill, 2015; Zins dan Weill, 2016). Selain itu, individu yang menikah memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk memiliki akses keuangan. Sementara itu, semakin besar ukuran rumah tangga, semakin kecil probabilitas memiliki akses (Allen *et al.*, 2016). Penelitian dari Grohmann *et al.* (2018) menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki dampak yang positif terhadap akses keuangan.

Selain faktor-faktor sosial dan ekonomi dari masyarakat, faktor yang memengaruhi penggunaan layanan keuangan dan kepemilikan rekening keuangan adalah biaya serta kualitas pelayanan dari jasa keuangan. Allen *et al.* (2016) menemukan bahwa biaya yang tinggi dapat menjadi hambatan akses keuangan. Dalam penelitian tersebut, biaya diukur dengan menanyakan persepsi bank sentral terhadap biaya akses keuangan yang terdiri dari biaya pembukaan rekening, pemeliharaan rekening, dan biaya transaksi. Bank sentral harus menilai apakah biaya yang berlaku di negaranya termasuk kategori

murah atau mahal. Selain itu, beberapa penelitian juga menemukan bahwa kualitas pelayanan yang kurang baik, seperti lemahnya keamanan serta tingginya biaya penggunaan layanan termasuk biaya transportasi, dapat menyebabkan turunnya inklusi keuangan (Allen *et al.*, 2016; Cole, 2009).

Metode

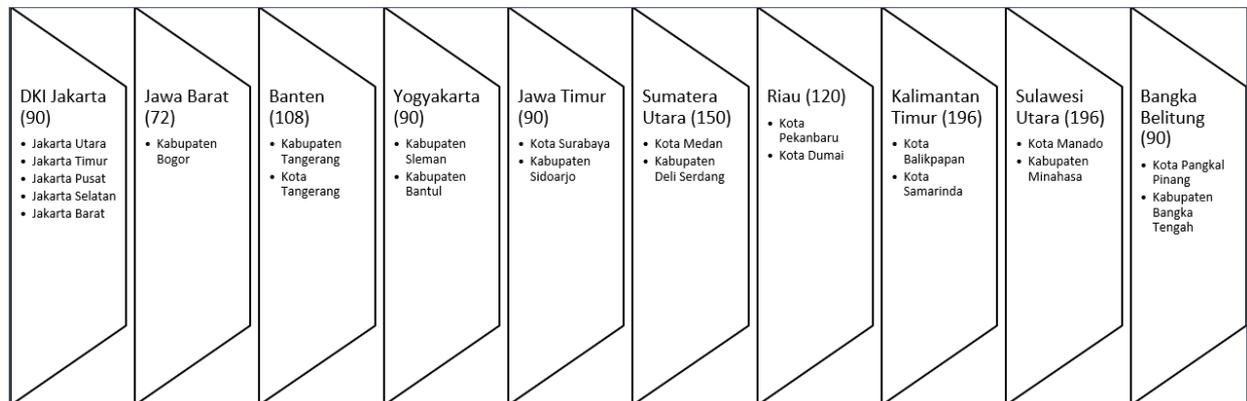
Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer. Pertama akan dibahas metode pemilihan sampel dan data yang berhasil diperoleh. Kemudian akan dijelaskan pula metode empiris yang digunakan dalam pengolahan data.

Pemilihan Sampel Wilayah

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, sepuluh provinsi dipilih sebagai lokasi survei. Lalu, dua kabupaten/kota dipilih dari setiap provinsi tersebut. Pemilihan provinsi dan kabupaten/kota dilakukan berdasarkan distribusi pengguna dan agen layanan keuangan. Daerah dengan jumlah penggunaan dan agen terbanyak dipilih sebagai lokasi survei untuk memaksimalkan cakupan. Data distribusi pengguna berasal dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan OJK, sedangkan data distribusi agen berasal dari data survei agen yang dilakukan oleh penulis. Sepuluh provinsi dan 22 kabupaten/kota terpilih sebagai wilayah kajian. Gambar 1 menunjukkan wilayah kajian pada penelitian ini.

Pemilihan Sampel Responden

Untuk memilih responden, enumerator menemui agen-agen yang ditempatkan oleh penyedia layanan pada lokasi terpilih. Untuk setiap agen terpilih, 4 orang pengguna LKD atau Laku Pandai dan 2 orang bukan pengguna layanan dipilih untuk diwawancarai. Responden bukan pengguna dapat merupakan pengguna layanan pada institusi keuangan formal



Gambar 1: Wilayah Survei
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

bank dan nonbank (koperasi, pegadaian, dan lain-lain), pengguna layanan pada institusi keuangan nonformal (arisan, tengkulak), atau individu yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan. Total responden adalah 1.038 yang terdiri atas:

- 233 orang pengguna LKD
- 448 orang pengguna Laku Pandai
- 357 orang bukan pengguna LKD maupun Laku Pandai

Model Empiris

Mengacu pada model yang dikembangkan oleh Zins dan Weill (2016), model empirik untuk mencari determinan dari penggunaan dan kepemilikan rekening LKD dan Laku Pandai yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$USE_i = \alpha_0 + \beta X_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

dengan USE_i adalah variabel *dummy* yang bernilai 1 apabila seseorang merupakan pengguna layanan LKD atau Laku Pandai dan 0 bila bukan pengguna. X_i adalah matriks dari variabel sosial-ekonomi dan demografi yang terdiri atas jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, status perkawinan, jumlah anggota rumah tangga, lokasi (desa/kota), kepemilikan motor, literasi finansial, dan tingkat pendapatan yang dapat memengaruhi keputusan individu untuk menggunakan layanan LKD dan Laku Pandai berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, hipotesis yang dibangun adalah laki-laki dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, menikah, memiliki anggota rumah tangga yang lebih sedikit, tinggal di perkotaan, memiliki literasi keuangan di atas rata-rata, berpendapatan tinggi, dan memiliki aset motor akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menggunakan layanan program LKD ataupun Laku Pandai.

Keadaan di Indonesia memungkinkan seseorang untuk menggunakan layanan LKD dan Laku Pandai untuk transaksi-transaksi kecil walaupun orang tersebut tidak memiliki rekening. Sementara itu, indikator global dari inklusi keuangan adalah kepemilikan rekening (Demirguc-Kunt *et al.*, 2015). Oleh karena itu, dilakukan pengembangan dari model Persamaan (1) untuk mencari determinan dari kepemilikan rekening LKD dan Laku Pandai sebagai berikut:

$$ACCOUNT_i = \beta_0 + \delta X_i + \gamma Z_i + \theta Costs_i + \delta Quality_i + \varepsilon_i \quad (2)$$

dengan $Account_i$ adalah variabel *dummy* yang bernilai

lai 1 apabila seseorang pemilik rekening LKD atau Laku Pandai dan bernilai 0 untuk lainnya. X_i adalah matriks dari variabel sosial-ekonomi dan demografi yang terdiri atas jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, status perkawinan, jumlah anggota rumah tangga, lokasi (desa/kota), kepemilikan motor, literasi finansial, dan tingkat pendapatan. Z_i adalah matriks yang berisi variabel karakteristik pengguna yang terdiri atas informasi apakah responden melakukan pengiriman uang (*transfer out*) dan lama menjadi pengguna, sementara $Costs_i$ adalah matriks dari variabel-variabel biaya, termasuk pengetahuan mengenai biaya, persepsi terhadap biaya transaksi, serta biaya transportasi yang diperlukan untuk mengakses layanan. $Quality_i$ adalah matriks yang berisi variabel-variabel persepsi atas kualitas pelayanan yang terdiri atas lima aspek layanan, yaitu layanan pengguna, kecepatan, keamanan layanan, keberhasilan transaksi, dan kemudahan.

Hipotesis dari model Persamaan (2) adalah:

- 1) Semakin tinggi biaya, baik biaya transportasi maupun biaya transaksi, serta semakin rendah pengetahuan mengenai harga, maka akan semakin rendah probabilitas terhadap kepemilikan rekening LKD ataupun Laku Pandai.
- 2) Semakin tinggi setiap aspek pelayanan (layanan pengguna, kecepatan, keamanan layanan, keberhasilan transaksi, dan kemudahan), akan semakin tinggi pula probabilitas kepemilikan rekening LKD ataupun Laku Pandai.
- 3) Selain itu, semakin sering seseorang menggunakan layanan untuk transaksi transfer serta semakin lama menggunakan fasilitas LKD maupun Laku Pandai, semakin tinggi kemungkinan orang tersebut untuk memiliki rekening.

Model Persamaan (1) dan (2) diestimasi dengan regresi logistik karena variabel dependen dalam kedua model merupakan variabel biner.

JEPI Vol. 19 No. 2 Juli 2019, hlm. 242–262

Hasil dan Analisis

Pertama, akan dibahas tingkat inklusi keuangan dari LKD dan Laku Pandai. Kemudian, kualitas layanan serta biaya akses yang mungkin dapat memengaruhi tingkat inklusi keuangan dari kedua program yang akan dieksplorasi. Terakhir, dengan metode regresi logistik, akan dibahas faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan rekening.

Tingkat Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai penggunaan layanan atau kepemilikan rekening. Bagian ini akan membahas tingkat inklusi keuangan dari program LKD dan Laku Pandai dengan menggunakan kedua definisi tersebut. Selanjutnya, akan dianalisa karakteristik pengguna kedua program serta hambatan dari inklusi keuangan.

Penggunaan dan Kepemilikan Rekening

LKD dapat dikatakan memperbaiki inklusi keuangan apabila program ini dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal, seperti bank, koperasi, dan pegadaian. Kelompok masyarakat ini hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan nonformal, seperti dari pinjaman dari keluarga maupun lintah darat atau tidak terjangkau akses keuangan sama sekali.

Gambar 2 menggambarkan klasifikasi dari pengguna LKD. Terdapat 233 pengguna LKD, namun sebagian besar dari pengguna telah memiliki akses ke layanan keuangan formal dan hanya 65 orang yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal sebelum penggunaan LKD. Jadi, tingkat inklusi keuangan LKD dari segi penggunaannya adalah 28%. Di Indonesia, sering kali masyarakat menggunakan layanan keuangan tanpa memiliki rekening sendiri, seperti dengan meminjam rekening saudara, teman,

maupun agen. Oleh karena itu, apabila inklusi keuangan didefinisikan sebagai kepemilikan rekening, maka tingkat inklusi keuangan turun ke angka 5% karena hanya 11 orang dari kelompok masyarakat ini (17%) yang memiliki rekening LKD.

Gambar 3 menggambarkan klasifikasi dari pengguna layanan Laku Pandai. Berdasarkan gambar ini dapat dilihat bahwa tingkat inklusi yang diukur dari penggunaan Laku Pandai cukup tinggi, yaitu 43%. Namun, apabila inklusi didefinisikan sebagai kepemilikan rekening, tingkat inklusi dari Laku Pandai adalah 25%, karena hanya 112 orang yang memiliki rekening Laku Pandai dari seluruh pengguna Laku Pandai.

Karakteristik Pengguna

Tabel 1 memuat karakteristik sosial ekonomi dari pengguna Laku Pandai dan LKD. Sebagian besar dari pengguna Laku Pandai dan LKD adalah perempuan. Sekitar 61% pengguna Laku Pandai dan 54% pengguna LKD adalah perempuan. Rata-rata tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan pengguna Laku Pandai lebih rendah dari pengguna LKD. Secara umum, pengguna juga lebih tua, memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah, serta memiliki akses internet yang lebih rendah bila dibandingkan dengan pengguna LKD.

Hambatan Inklusi Keuangan

Penelitian ini juga mencoba menganalisis mengapa masyarakat tidak tertarik menjadi pengguna layanan keuangan digital yang tersedia. Gambar 4 memperlihatkan bahwa 152 dari responden tanpa akses ke institusi keuangan formal tidak mengetahui apa itu LKD (80%). Sementara itu, dari 24 responden yang mengetahui LKD, 3 orang menyatakan bahwa harga layanan merupakan alasan tidak menggunakan LKD (12,5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hambatan nonharga berupa tidak adanya pengetahuan mengenai LKD serta

hambatan nonharga lain merupakan penyebab utama seseorang tidak menjadi pengguna.

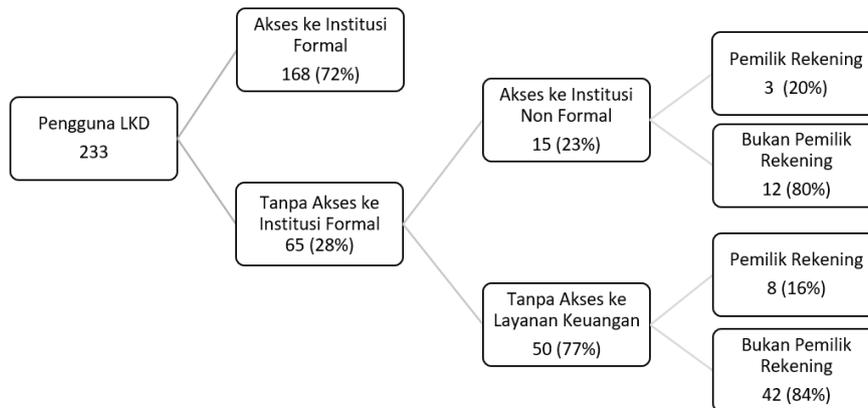
Pola yang sama juga didapatkan pada hambatan penggunaan Laku Pandai dengan hambatan nonharga merupakan faktor penentu seseorang tidak menggunakan layanan Laku Pandai. Sebanyak 176 responden bukan pengguna yang tidak memiliki akses ke institusi keuangan formal, dengan 141 orang tidak memiliki pengetahuan tentang program Laku Pandai (80%). Sementara itu, dari 22 orang yang mengetahui program Laku Pandai, hanya 3 orang menyatakan bahwa harga layanan merupakan alasan tidak menggunakan layanan Laku Pandai (14%).

Kualitas Layanan

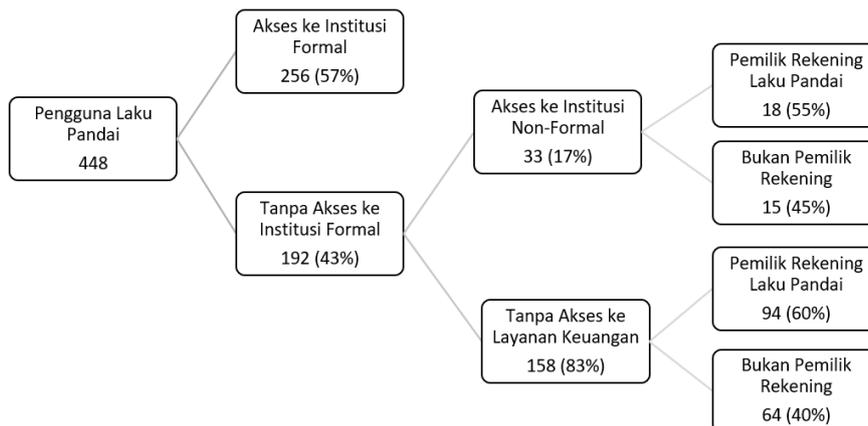
Salah satu faktor yang menentukan kepemilikan rekening adalah kualitas pelayanan (Allen *et al.*, 2016). Gambar 6 menggambarkan grafik persepsi pengguna LKD terhadap kualitas pelayanan LKD apabila dibandingkan dengan institusi keuangan lainnya. Terdapat enam aspek layanan yang dinilai, yaitu pelayanan konsumen (*customer service*), kecepatan layanan, keberhasilan transaksi, keamanan transaksi, biaya/harga layanan, dan kemudahan penggunaan.

Secara umum, kebanyakan responden menilai kualitas pelayanan LKD tidak memiliki perbedaan atau lebih buruk apabila dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan lembaga keuangan formal bank maupun nonbank dalam keenam aspek kualitas yang dinilai (Panel 1 dan 2). Sementara itu, apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan nonformal, pelayanan LKD dinilai lebih baik terutama dalam aspek pelayanan konsumen dan keberhasilan transaksi. Namun, mayoritas responden menilai bahwa transaksi menggunakan LKD lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan lembaga keuangan nonformal (Panel 3).

Sementara itu, Gambar 7 menggambarkan grafik persepsi responden terhadap kualitas pelayanan



Gambar 2: Klasifikasi Pengguna LKD
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

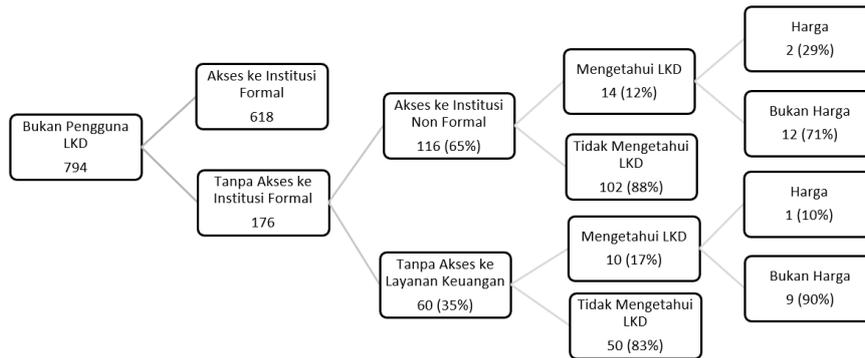


Gambar 3: Klasifikasi Pengguna Laku Pandai
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

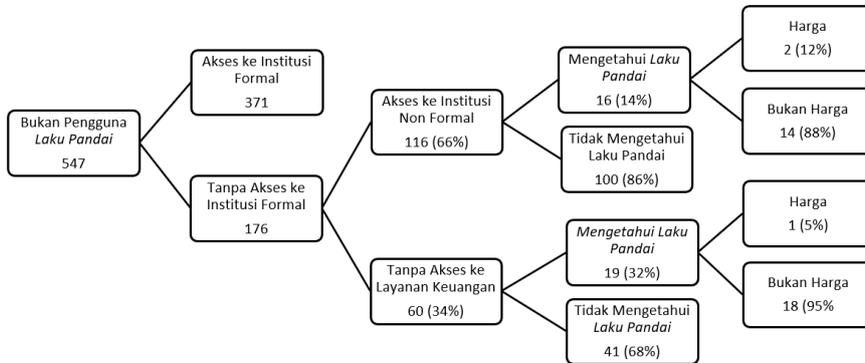
Tabel 1: Karakteristik Pengguna

Demografi	Laku Pandai	LKD
Jenis Kelamin	61% Perempuan	54% Perempuan
Tingkat Pendidikan	53% Lulusan SMA, 16% Lulusan SMP	50% Lulusan SMA, 38% Sarjana
Umur	60% berumur antara 26–45 tahun	60% berumur antara 21–35 tahun
Pendapatan	65% di bawah Rp2.000.000	52% di atas Rp2.000.000
Kota	63% tinggal di kota	82% tinggal di kota
Akses Internet	62%	85%
Literasi keuangan	86%	93%

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis



Gambar 4: Hambatan Penggunaan LKD
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis



Gambar 5: Hambatan Penggunaan Laku Pandai
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

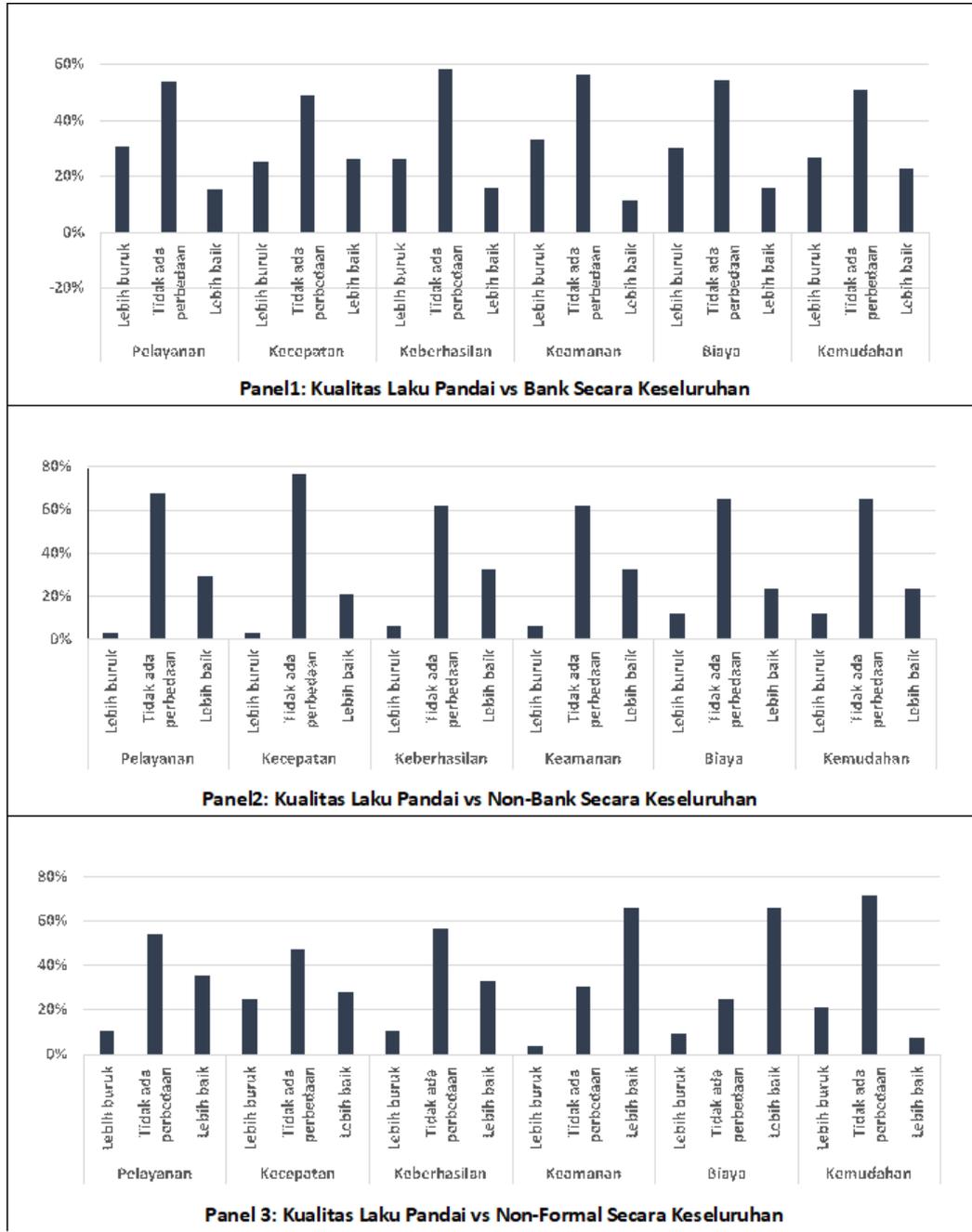
Laku Pandai dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Secara umum, mayoritas responden menilai pelayanan yang diberikan Laku Pandai sama atau lebih baik dari lembaga keuangan formal nonbank dan lembaga keuangan nonformal. Namun, banyak responden menilai pelayanan yang diberikan Laku Pandai masih di bawah kualitas pelayanan bank. Meskipun demikian, mayoritas pengguna kedua jenis pelayan menilai pelayanan Laku Pandai sama atau lebih cepat dibandingkan pelayanan transaksi di bank (Panel 1). Selain itu, mayoritas responden pengguna jasa menilai layanan Laku Pandai superior bila dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan institusi formal nonbank (Panel 2). Laku Pandai memiliki keunggulan dibandingkan institusi formal nonbank, terutama pada

aspek keamanan dan biaya. Pelayanan Laku Pandai juga unggul apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan nonformal (Panel 3). Namun, kebanyakan pengguna menilai lembaga keuangan nonformal lebih baik dalam hal kemudahan. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak adanya syarat-syarat seperti adanya tanda pengenal dalam mengakses layanan keuangan nonformal. Kemudahan dapat menjadi faktor yang menjelaskan mengapa masih terdapat kelompok masyarakat yang memilih menggunakan lembaga keuangan nonformal dibandingkan layanan yang ditawarkan oleh bank maupun lembaga keuangan formal lainnya.

Namun, dalam perbandingan kualitas layanan antara kedua program harus dilaksanakan dengan hati-hati dan memperhatikan karakteristik penggu-



Gambar 6: Kualitas Subjektif Laku Pandai
 Sumber: Hasil Pengolahan Penulis



Gambar 7: Kualitas Subjektif Laku Pandai
 Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

na. Mayoritas pengguna LKD tinggal di perkotaan dengan akses keuangan formal dan akses komunikasi yang lebih tinggi. Pengguna LKD umumnya memiliki paparan terhadap layanan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan pengguna layanan Laku Pandai.

Biaya Akses

Menurut Allen *et al.* (2016), biaya untuk mengakses layanan merupakan faktor lain yang memengaruhi inklusi keuangan. Penelitian ini mengeksplorasi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mengakses layanan LKD maupun Laku Pandai. Terdapat beberapa jenis biaya yang dapat dianalisis, yaitu biaya transaksi (harga), biaya transportasi, dan waktu menunggu untuk menggambarkan biaya dalam bentuk waktu.

Harga Layanan dan Pengetahuan tentang Harga

Pada Tabel 2 dapat terlihat bahwa secara umum proporsi masyarakat yang tidak mengetahui biaya transaksi resmi LKD (harga) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih cukup besar. Proporsi responden yang tidak mengetahui biaya *top up* mencapai 42% dari pengguna layanan LKD. Sementara itu, nilai tengah dari biaya transaksi yang ditetapkan oleh agen di lapangan masih di dalam interval biaya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kecuali untuk transaksi *top up*. Namun, masih terdapat pengguna layanan yang harus membayar biaya transaksi di atas pagu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Proporsi responden yang mengalami *overcharge* berbeda-beda tergantung jenis transaksi. Proporsi terendah adalah untuk transaksi pembayaran sementara, hampir separuh responden harus membayar biaya *top up* yang lebih tinggi dari pagu.

Selanjutnya, untuk layanan Laku Pandai, pada Tabel 3 terlihat bahwa 9%–24% dari pengguna Laku Pandai tidak mengetahui biaya (harga) transaksi

resmi yang telah ditetapkan. Sama dengan LKD, nilai tengah biaya transaksi yang dikenakan oleh agen di lapangan masih berada dalam pagu biaya transaksi yang telah ditentukan oleh OJK. Namun, seperti pada kasus LKD, masih terdapat pengguna Laku Pandai yang harus membayar biaya transaksi di atas pagu yang telah ditetapkan. Walaupun demikian masalah ketidaktahuan dan *overcharge* biaya transaksi pada pengguna layanan Laku Pandai relatif lebih kecil dibandingkan dengan LKD.

Biaya Transportasi dan Waktu Tunggu

Tabel 3 memuat informasi mengenai biaya transportasi dan waktu tunggu yang harus ditanggung oleh pengguna layanan keuangan untuk mencapai dan menggunakan akses layanan keuangan, baik untuk institusi formal maupun nonformal. Berdasarkan data, nilai tengah dari jarak, waktu, maupun biaya transportasi untuk mengakses layanan Laku Pandai relatif lebih murah dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Sementara nilai tengah dari jarak, waktu, maupun biaya transportasi untuk mengakses LKD tidak memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan formal bank maupun nonbank. Bank, secara umum, terletak lebih jauh dengan biaya transportasi dan waktu tunggu terlama bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Sementara itu, lembaga keuangan nonformal, secara umum memiliki biaya transportasi dan waktu tunggu terendah. Masyarakat dapat langsung meminjam uang atau menabung ke toko atau komunitas yang tinggal di dekat rumah sehingga biaya transportasi dan waktu tunggu relatif rendah untuk institusi nonformal.

Determinan Penggunaan Layanan Keuangan

Tabel 6 memuat hasil regresi logistik determinan penggunaan LKD dan Laku Pandai. Kolom 1 dan 2 merupakan determinan penggunaan untuk selu-

Tabel 2: Biaya Layanan dan Pengetahuan Tentang Biaya Layanan LKD

Jenis Layanan	Harga Resmi Agen (Rp)	Biaya di Lapangan (Rp) (Median)	Tidak Mengetahui Harga Layanan	Membayar lebih tinggi dari harga resmi tertinggi	N
Top up	0-1.500	2.000	42%	46%	139
Transfer	0-6.500	5.000	26%	22%	23
Penarikan	0-5.000	3.000	31%	23%	13
Pembayaran	0-2.500	2.000	38%	19%	189

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 3: Biaya Layanan dan Pengetahuan Mengenai Biaya Layanan Laku Pandai

Jenis Layanan	Harga Resmi Agen (Rp)	Biaya di Lapangan (Rp) (Median)	Tidak Mengetahui Harga Layanan	Membayar lebih tinggi dari harga resmi tertinggi	N
Menabung	Gratis-1.000	0	18%	22%	175
Transfer	Gratis-6.500	5.000	10%	25%	182
Penarikan	Gratis-7.500	4.000	9%	7%	97
Pembayaran	2.000-2.500	2.500	24%	26%	196

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 4: Biaya Transportasi dan Waktu Tunggu

Institusi	Jarak (m)		Waktu (menit)		Biaya (Rp)		Waktu Tunggu	
	Median	N	Median	N	Median	N	Median	N
Bank	1.800	524	15	515	5.000	530	15	535
Nonbank	1.000	96	15	97	3.000	97	5	101
Nonformal	20	285	3	279	0	285	3	287
Laku Pandai	500	475	10	469	0	477	5	482
LKD	1.000	234	15	230	5.000	236	5	240

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

ruh sampel. Sementara itu, kolom 3 dan 4 memuat determinan penggunaan ketika penulis membatasi analisis pada responden yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Hal ini perlu dilakukan karena tingkat inklusi finansial suatu negara dapat meningkat hanya jika kelompok masyarakat yang belum memiliki akses keuangan formal mulai menggunakan layanan dan memiliki rekening. Lebih lanjut, kelompok masyarakat ini juga kemungkinan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya yang mendorong atau menghambat untuk mengakses layanan keuangan.

Hasil regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat *gender gap* dalam inklusi keuangan di area pengamatan apabila inklusi diukur dengan penggunaan layanan. Bila melihat hasil untuk seluruh sampel, terlihat bahwa terdapat *education gap* dalam penggunaan LKD, yang mana masyarakat dengan pendidikan SLTA atau lebih tinggi (universitas) memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menggunakan

layanan LKD, namun hal ini tidak ditemui pada penggunaan Laku Pandai. Selain itu, hasil regresi juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi probabilitas individu untuk menggunakan LKD yang ditunjukkan oleh efek marginal negatif dari kuartil 1 sampai kuartil 3. Sementara itu, individu di kuartil ke-2 memiliki probabilitas yang lebih besar daripada individu di kuartil ke-4 untuk menggunakan layanan Laku Pandai.

Hasil regresi untuk seluruh sampel juga menunjukkan bahwa individu yang belum menikah dan memiliki literasi finansial yang baik memiliki probabilitas yang lebih besar untuk menggunakan LKD. Sebaliknya, pengguna Laku Pandai cenderung sudah menikah dan tinggal di pedesaan. Tidak terdapat bukti yang cukup secara statistik bahwa usia dan jumlah anggota keluarga memengaruhi penggunaan layanan keuangan.

Analisis pada kelompok masyarakat tanpa akses

Tabel 5: Determinan Penggunaan LKD dan Laku Pandai

	<i>Full Sample</i>		Tanpa Akses ke Institusi Formal	
	LKD	Laku Pandai	LKD	Laku Pandai
	[1]	[2]	[3]	[4]
<i>female</i>	-0,033 (-1,31)	0,189	-0,034 (-0,96)	-0,017 (-0,34)
<i>age</i>	-0,002 (-1,40)	-0,001 (-0,91)	-0,001 (-0,73)	-0,001 (-0,63)
<i>married</i>	-0,053* (-1,74)	0,103*** (2,68)	0,006 (0,17)	0,070 (1,63)
<i>hh size</i>	-0,013 (-1,41)	0,092 (1,13)	-0,012 (-1,08)	-0,001 (-0,07)
<i>highschool</i>	0,116*** (3,56)	-0,06 (-1,40)	0,077** (2,26)	-0,060 (-1,11)
<i>university</i>	0,067** (2,19)	-0,058 (-1,43)	0,509 (1,14)	-0,174* (-1,92)
<i>urban</i>	0,257 (1,26)	-0,082** (-2,26)	-0,014 (-0,42)	-0,097* (-1,88)
<i>finlit</i>	0,093*** (3,51)	0,146 (0,62)	0,118*** (3,58)	-0,029 (-0,57)
<i>motor</i>	0,345 (1,13)	0,095** (2,02)	0,087** (2,41)	0,521 (1,18)
<i>quartile1</i>	-0,159*** (-5,37)	-0,005 (-0,10)	-0,139*** (-4,02)	-0,078 (-0,99)
<i>quartile2</i>	-0,138*** (-5,08)	0,105** (2,56)	-0,167*** (-4,45)	0,317 (0,66)
<i>quartile3 (base=quartile4)</i>	-0,0870*** (-3,10)	0,508 (1,59)	-0,110*** (-3,38)	0,106* (1,96)
N	1.035	1.035	432	432

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: efek marginal, *t-statistic* di dalam kurung,

* signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%

keuangan formal menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil seluruh sampel untuk penggunaan LKD. Sementara itu, individu dengan pendidikan lebih rendah dari universitas, tinggal di pedesaan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menggunakan layanan Laku Pandai. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, umur, maupun ukuran rumah tangga dalam hal penggunaan layanan keuangan LKD dan Laku Pandai. Terdapat juga indikasi bahwa Laku Pandai lebih inklusif pada segmen masyarakat yang menikah, tinggal di pedesaan, serta memiliki tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang rendah. Pada segmen masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, Laku Pandai juga inklusif pada kelompok masyarakat yang tinggal di pedesaan dan memiliki pendidikan lebih rendah

dari universitas. Sementara itu, LKD lebih menarik untuk digunakan bagi kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi.

Determinan Kepemilikan Rekening

Indonesia memiliki banyak kasus yang mana masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan tanpa memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Masyarakat meminjam rekening atau meminta orang lain untuk melakukan transaksi keuangan bagi masyarakat tersebut. Walaupun masyarakat sebenarnya memiliki akses pada layanan keuangan, apabila inklusi keuangan didefinisikan sebagai kepemilikan rekening, maka kelompok masyarakat ini tergolong ke dalam kelompok yang teresklusi dari layanan keuangan. Sementara itu, perhitungan

Tabel 6: Determinan of Kepemilikan Rekening

	<i>Full Sample</i>		Tanpa Akses ke Institusi Formal
	LKD	Laku Pandai	Laku Pandai
	[1]	[2]	[3]
<i>Social Demographic Characteristics</i>			
<i>female</i>	0,0302 (0,55)	0,148*** (3,52)	0,357*** (5,52)
<i>urban</i>	0,193*** (3,16)	0,0354 (0,78)	0,0692 (0,98)
<i>User Characteristics</i>			
<i>Without formal access</i>	-0,209*** (-3,00)	0,152*** (3,66)	.
<i>transfer out</i>	0,199** (2,31)	0,112* (1,76)	0,270*** (2,71)
<i>time as user</i>	0,00621** (2,39)	0,0101*** (5,63)	0,0121*** (4,24)
<i>Subjective Quality</i>			
<i>service</i>	-0,0133 (-0,15)	-0,103* (-1,69)	-0,0895 (-1,22)
<i>speed</i>	-0,058 (-0,68)	-0,164*** (-2,60)	-0,1310 (-1,30)
<i>transaction success</i>	0,0033 (0,04)	-0,176*** (-2,58)	-0,214** (-2,16)
<i>security</i>	0,168*** (2,80)	0,0266 (0,46)	0,138 (1,55)
<i>ease</i>	0,0605 (0,85)	-0,0324 (-0,60)	-0,0697 (-0,90)
<i>Costs</i>			
<i>cost perception</i>	-0,0875 (-1,32)	0,184*** (4,41)	0,158*** (2,62)
<i>transport costs</i>	-0,00246 (-0,14)	0,0370* (1,91)	0,0703* (1,81)
<i>costs awareness</i>	0,175*** (3,28)	-0,0648 (-1,21)	0,0439 (0,53)
N	221	434	185

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: efek marginal, *t-statistic* di dalam kurung, *full control*,

* signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%

inklusi keuangan menurut *Global Financial Index* adalah kepemilikan rekening. Oleh karena itu, pemerintah melalui program-program yang dijalankan, termasuk melalui LKD dan Laku Pandai, harus dapat meningkatkan angka kepemilikan rekening untuk menaikkan tingkat inklusi keuangan.

Tabel 6 berisi hasil regresi determinan kepemilikan rekening LKD dan Laku Pandai. Selain faktor sosial dan demografi, kualitas layanan subjektif dan biaya juga digunakan sebagai variabel penjelas dari kepemilikan rekening. Kolom 1 dan 2 berisi hasil regresi untuk seluruh responden, sedangkan kolom 3 berisi hasil regresi kepemilikan rekening Laku

Pandai untuk responden tanpa akses ke institusi keuangan formal. Penulis tidak menyajikan hasil untuk LKD karena ukuran sampel yang terlalu kecil untuk kelompok ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan hasil yang ditemukan secara global (Demirgüç-Kunt dan Klapper, 2013) dan di Cina (Fungáčová dan Weill, 2015), yakni penulis tidak menemukan adanya *gender gap* terhadap perempuan pada kepemilikan rekening LKD dan Laku Pandai. Bahkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa probabilitas memiliki rekening Laku Pandai lebih tinggi bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki,

baik pada regresi dengan seluruh sampel maupun subsampel kelompok tanpa akses keuangan formal. Hal ini mengindikasikan inklusifitas program Laku Pandai terhadap kelompok masyarakat yang biasa termarginalisasikan, yaitu perempuan. Penduduk perkotaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki rekening LKD. Sementara itu, tempat tinggal tidak memengaruhi kepemilikan rekening Laku Pandai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna layanan yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal memiliki probabilitas lebih rendah untuk memiliki rekening LKD. Sebaliknya, pengguna Laku Pandai tanpa akses ke lembaga keuangan formal memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk memiliki rekening. Hal ini menunjukkan bahwa Laku Pandai lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama apabila inklusi keuangan didefinisikan sebagai kepemilikan rekening formal sesuai dengan *Global Financial Index*. Selanjutnya, semakin lama seseorang menggunakan layanan LKD dan Laku Pandai, maka akan semakin besar probabilitas orang tersebut untuk memiliki rekening walaupun ukuran dari efek kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa dibutuhkan waktu bagi pengguna layanan untuk membuka rekening. Kemungkinan salah satu alasannya adalah seseorang membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan antara pengguna dan agen.

Penggunaan layanan untuk pengiriman uang meningkatkan probabilitas seseorang untuk memiliki rekening LKD (Kolom 1). Semakin tinggi persepsi pengguna terhadap kualitas keamanan yang diberikan LKD, maka akan semakin tinggi pula probabilitas pengguna untuk memiliki rekening. Sementara itu, kualitas subjektif pelayanan lainnya tidak memengaruhi probabilitas pengguna untuk memiliki rekening. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan rekening LKD tidak sensitif terhadap biaya, baik yang berbentuk harga layanan (subjektif) maupun biaya transaksi. Lebih lanjut, *JEPI Vol. 19 No. 2 Juli 2019, hlm. 242–262*

pengetahuan mengenai harga layanan berasosiasi positif dengan kepemilikan rekening LKD.

Sejalan dengan hasil LKD, penggunaan layanan untuk pengiriman uang meningkatkan probabilitas pengguna Laku Pandai tanpa akses ke institusi formal untuk memiliki rekening (Kolom 3). Kualitas pelayanan dalam bentuk keamanan transaksi juga merupakan faktor pendorong yang penting bagi kelompok pengguna ini untuk memiliki rekening Laku Pandai. Namun, penulis menemukan bahwa pengguna Laku Pandai yang memberikan nilai tinggi pada aspek kualitas kecepatan dan kesuksesan transaksi memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk memiliki rekening.

Berbeda dengan LKD, kepemilikan rekening Laku Pandai sensitif terhadap biaya, baik yang berbentuk biaya layanan (subjektif) maupun biaya transportasi. Pengguna yang menilai layanan Laku Pandai murah memiliki kecenderungan 15,8% lebih tinggi untuk memiliki rekening jika dibandingkan dengan kelompok pengguna yang menilai layanan mahal. Selain itu, naiknya biaya transportasi berasosiasi positif dengan kepemilikan rekening. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengguna yang memiliki rekening Laku Pandai cenderung tinggal jauh dari agen. Hal ini mungkin juga menjawab pertanyaan mengapa hasil negatif dari variabel kecepatan dan kesuksesan transaksi didapatkan. Pada area tersebut, infrastruktur yang memungkinkan transaksi dapat berjalan dengan baik kemungkinan masih kurang baik. Pengetahuan tentang harga tidak memengaruhi kepemilikan rekening Laku Pandai.

Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa usaha program Laku Pandai untuk menjangkau masyarakat yang berlokasi jauh dari agen akan berkontribusi pada keberhasilan program untuk mendorong masyarakat untuk memiliki rekening keuangan formal. Namun, penyedia jasa layanan dan agen harus berhati-hati dalam menentukan biaya transaksi, karena kepemilikan rekening sensi-

tif terhadap besarnya biaya transaksi. Di sisi lain, kepemilikan rekening LKD tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya biaya transaksi. Tetapi, penting bagi pengguna LKD untuk mengetahui berapa biaya transaksi tersebut dalam keputusannya untuk memiliki rekening.

Kesimpulan

Inklusi program LKD dan Laku Pandai berdasarkan penelitian ini mencapai 28% dan 43% apabila inklusi diukur dengan penggunaan layanan (inklusi akses). Namun, inklusi turun ke angka 5% dan 25% apabila inklusi didefinisikan sebagai kepemilikan rekening. Minimnya informasi mengenai program merupakan hambatan utama dalam pengembangan akses keuangan melalui agen baik pada program LKD maupun Laku Pandai.

Laku Pandai memiliki keunggulan dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat yang tinggal di pedesaan, berpendidikan, dan berpendapatan rendah. Program Laku Pandai dapat menyediakan layanan yang dinilai lebih efisien dibandingkan lembaga keuangan lain dalam segi biaya transaksi dan transportasi serta memiliki kualitas pelayanan yang lebih tinggi, baik dari aspek keamanan, keberhasilan, kecepatan, pelayanan konsumen, serta kemudahan oleh kelompok masyarakat tersebut. Di sisi lain, biaya akses LKD dinilai tidak jauh berbeda dari lembaga keuangan lainnya, sedangkan kualitas pelayanan Laku Pandai tidak lebih baik bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga tersebut. Lebih lanjut, efisiensi dari program LKD maupun Laku Pandai harus ditingkatkan mengingat masih maraknya *overcharging* dari biaya transaksi pada kedua program tersebut.

Hasil regresi mengonfirmasi bahwa Laku Pandai inklusif bagi kelompok masyarakat yang tinggal di pedesaan, berpendidikan, dan berpendapatan rendah, serta memiliki pengetahuan keuangan yang relatif rendah. Hasil regresi untuk kepemilikan reke-

ning juga menunjukkan bahwa Laku Pandai efektif dalam mengembangkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan formal. Tidak terdapat *gender gap* dalam inklusi keuangan terhadap perempuan. Baik pengguna LKD maupun Laku Pandai memerlukan waktu untuk memiliki rekening. Faktor lain yang penting dalam menentukan kepemilikan rekening adalah pengetahuan/kepastian biaya transaksi (LKD) dan biaya akses dalam bentuk biaya transaksi dan transportasi (Laku Pandai). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan penyedia jasa layanan untuk mengendalikan *overcharging* yang masih banyak terjadi di lapangan.

Saran

Informasi dan data mengenai penggunaan layanan keuangan berbasis agen, terutama mengenai LKD, masih terbatas meskipun pendekatan ini cukup efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian lebih lanjut mengenai inklusi keuangan melalui kedua program ini di daerah lain di Indonesia, terutama daerah yang masih terpencil, masih perlu untuk dilakukan. Penelitian mengenai komparasi efektivitas program LKD, Laku Pandai, dan program-program lainnya juga di berbagai daerah juga diperlukan sebagai masukan bagi pemerintah untuk menentukan strategi inklusi keuangan yang paling efektif dan efisien yang mungkin berbeda di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Akudugu, M. A. (2013). The determinants of financial inclusion in Western Africa: Insights from Ghana. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(8), 1-9.
- [2] Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Peria, M. S. M. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1-30. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>.
- [3] Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, *JEFI Vol. 19 No. 2 Juli 2019, hlm. 242-262*

- inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49. doi: <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>.
- [4] Bruhn, M., & Love, I. (2014). The real impact of improved access to finance: Evidence from Mexico. *The Journal of Finance*, 69(3), 1347-1376. doi: <https://doi.org/10.1111/jofi.12091>.
- [5] Cole, S. (2009). Financial development, bank ownership, and growth: or, does quantity imply quality?. *The Review of Economics and Statistics*, 91(1), 33-51. doi: <https://doi.org/10.1162/rest.91.1.33>.
- [6] Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring financial inclusion: The Global Findex database. *Policy Research Working Paper*, 6025. Finance and Private Sector Development Team, Development Research Group, The World Bank. Diakses 31 Juni 2019 dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/453121468331738740/Measuring-financial-inclusion-the-Global-Findex-Database>.
- [7] Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2013). Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries. *Brookings Papers on Economic Activity*, 44(1), 279-340. Diakses 31 Juni 2019 dari https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/2013a_klapper.pdf.
- [8] Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The Global Findex Database 2014: Measuring financial inclusion around the world. *Policy Research Working Paper*, 7255. Finance and Private Sector Development Team, Development Research Group, World Bank Group. Diakses 31 Juni 2019 dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/The-Global-Findex-Database-2014-measuring-financial-inclusion-around-the-world>.
- [9] Fungáčová, Z., & Weill, L. (2015). Understanding financial inclusion in China. *China Economic Review*, 34, 196-206. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.12.004>.
- [10] Grohmann, A., Klühs, T., & Menkhoff, L. (2018). Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. *World Development*, 111, 84-96. doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.020>.
- [11] Han, R., & Melecky, M. (2013). Financial inclusion for financial stability: Access to bank deposits and the growth of deposits in the global financial crisis. *Policy Research Working Paper*, 6577. Office of the Senior Vice President and Chief Economist, Development Economics, The World Bank. Diakses 31 Juni 2019 dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/850681468325448388/Financial-inclusion-for-financial-stability-access-to-bank-deposits-and-the-growth-of-deposits-in-the-Global-Financial-Crisis>.
- [12] Hannig, A., & Jansen, S. (2010). Financial inclusion and financial stability: Current policy issues. *ADB Working Paper Series*, 259. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Diakses 31 Juni 2019 dari <https://www.adb.org/publications/financial-inclusion-and-financial-stability-current-policy-issues>.
- [13] Intermedia. (2016). *Financial Inclusion Insights (FII) Reports*. [See reports for Indonesia, Bangladesh, India, Pakistan, Kenya, Nigeria, Tanzania, and Uganda]. Washington D.C.: InterMedia. Diakses 10 Januari 2019 dari <http://finclusion.org/reports/>.
- [14] Marr, A., Leon, J., & Ponce, F. (2014). Financial inclusion of the poor in Peru: explanatory factors and determinants. *Applied Econometrics and International Development*, 14(1), 101-122.
- [15] OJK. (2019). *Data Perkembangan Program Laku Pandai s/d Posisi Maret 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 2 April 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>.
- [16] Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. *Journal of International Development*, 23(5), 613-628. doi: <https://doi.org/10.1002/jid.1698>.
- [17] Swamy, V. (2014). Financial inclusion, gender dimension, and economic impact on poor households. *World Development*, 56, 1-15. doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.019>.
- [18] United Nations. (2016, July). *Digital financial inclusion*. International Telecommunication Union (ITU). *Issue Brief Series*. Inter-Agency Task Force on Financing for Development - United Nations. Diakses 31 Juni 2019 dari <https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/01/Digital-Financial-Inclusion-ITU-IATF-Issue-Brief.pdf>.
- [19] World Bank. (2009). *Banking the poor: Measuring banking access in 54 economies*. Washington, DC: World Bank. Diakses 31 Juni 2019 dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/608761468157765351/Banking-the-poor-measuring-banking-access-in-54-economies>.
- [20] World Bank. (2014). *Global financial development report 2014: Financial inclusion*. Washington, DC.: World Bank. Diakses 31 Juni 2019 dari <http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFINREPORT/Resources/8816096-1361888425203/9062080-1364927957721/GFDR-2014-Complete-Report.pdf>.
- [21] World Bank. (2018). *The little data book on financial inclusion 2018*. Washington, DC: World Bank. Diakses 2 April 2019 dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29654>.
- [22] Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46-57. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>.

Lampiran

Tabel A1: Definisi Variabel

Variabel	Definisi
<i>Dependent Variables</i>	
USE	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila seseorang merupakan pengguna layanan LKD atau Laku Pandai dan 0 bila bukan pengguna.
ACCOUNT	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila seseorang merupakan anggota LKD terdaftar (<i>registered</i>) atau pemilik rekening Laku Pandai dan 0 bila bukan pemilik rekening.
<i>Socio-Demographic</i>	
<i>female</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden perempuan dan 0 jika lainnya.
<i>age</i>	Umur responden (dalam tahun).
<i>married</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden menikah dan 0 jika lainnya.
<i>hh member</i>	Jumlah anggota rumah tangga termasuk kepala rumah tangga.
<i>highschool</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden berpendidikan SLTA dan 0 jika lainnya.
<i>uni</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden berpendidikan diploma atau lebih tinggi dan 0 jika lainnya.
<i>urban</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden tinggal di kota dan 0 jika lainnya.
<i>finlit</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden memiliki nilai literasi keuangan di atas rata-rata dan 0 jika lainnya.
<i>motor</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden memiliki paling tidak satu sepeda motor dan 0 jika lainnya.
<i>Income</i>	
<i>quartile1</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila pendapatan rumah tangga responden berada pada kuartil 1 (25% termiskin) dan 0 jika lainnya.
<i>quartile2</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila pendapatan rumah tangga responden berada pada kuartil 2 (25% kedua) dan 0 jika lainnya.
<i>quartile3</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila pendapatan rumah tangga responden berada pada kuartil 3 (25% ketiga) dan 0 jika lainnya.
<i>quartile4</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila pendapatan rumah tangga responden berada pada kuartil 4 (25% terkaya) dan 0 jika lainnya.
<i>User Characteristics</i>	
<i>Nonformal</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden tidak memiliki akses keuangan lain kecuali melalui LKD atau Laku Pandai dan bernilai 0 jika responden memiliki akses.
<i>time as user</i>	Variabel yang mengukur lamanya responden telah menggunakan pelayanan LKD atau Laku Pandai (dalam bulan).
<i>transfer_out</i>	Jumlah uang yang ditransfer ke luar oleh rumah tangga (dalam ribuan rupiah).
<i>Subjective Quality</i>	
<i>service</i>	Persepsi pengguna LKD/Laku Pandai terhadap layanan pengguna, bernilai 1 apabila baik atau sangat baik dan 0 jika lebih rendah.
<i>Speed</i>	Persepsi pengguna LKD/Laku Pandai terhadap kecepatan layanan, bernilai 1 apabila baik atau sangat baik dan 0 jika lebih rendah.
<i>transaction success</i>	Persepsi pengguna LKD/Laku Pandai terhadap kesuksesan transaksi, bernilai 1 apabila baik atau sangat baik dan 0 jika lebih rendah.
<i>security</i>	Persepsi pengguna LKD/Laku Pandai terhadap keamanan transaksi, bernilai 1 apabila baik atau sangat baik dan 0 jika lebih rendah.
<i>Ease</i>	Persepsi pengguna LKD/Laku Pandai terhadap kemudahan penggunaan layanan, bernilai 1 apabila baik atau sangat baik dan 0 jika lebih rendah.
<i>Costs</i>	
<i>cost perception</i>	Persepsi pengguna LKD/Laku Pandai terhadap biaya transaksi, bernilai 1 apabila dianggap murah atau sangat murah dan 0 jika lebih mahal.
<i>transport costs</i>	Biaya yang harus dikeluarkan responden untuk mencapai <i>service point</i> /agen DFS atau Laku Pandai terdekat (dalam ribuan rupiah).
<i>costs awareness</i>	Variabel <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila responden mengetahui biaya transaksi LKD/Laku Pandai dan 0 jika dia tidak mengetahui.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel A2: Account Ownership (Full Regression Results)

	Full Sample		Tanpa Akses ke Institusi Formal
	LKD	Laku Pandai	Laku Pandai
	[1]	[2]	[3]
<i>Social Demographic Characteristics</i>			
<i>female</i>	0,0302 (0,55)	0,148*** (3,52)	0,357*** (5,52)
<i>Age</i>	-0,0000711 (-0,02)	0,0000431 (0,02)	-0,00239 (-0,65)
<i>married</i>	-0,0318 (-0,53)	-0,151*** (-2,61)	-0,0310 (-0,35)
<i>hh member</i>	0,00955 (0,42)	0,0177 (1,17)	-0,0111 (-0,51)
<i>highschool</i>	-0,152 (-1,47)	-0,00753 (-0,14)	-0,0395 (-0,52)
<i>university</i>	-0,163*** (-2,90)	-0,173*** (-2,99)	-0,1910 (-1,07)
<i>Urban</i>	0,193*** (3,16)	0,0354 (0,78)	0,0692 (0,98)
<i>Finlit</i>	0,150** (2,21)	-0,00942 (-0,21)	0,0416 (0,58)
<i>motor</i>	-0,112 (-0,79)	-0,0895 (-1,26)	0,0436 (0,52)
<i>quartile1</i>	0,214* (1,74)	-0,0242 (-0,34)	0,1010 (0,95)
<i>quartile2</i>	0,0512 (0,60)	-0,00509 (-0,09)	0,1120 (1,21)
<i>quartile3</i>	-0,143* (-1,92)	-0,0775 (-1,25)	0,0238 (0,24)
<i>User Characteristics</i>			
<i>transfer out</i>	0,199** (2,31)	0,112* (1,76)	0,270*** (2,71)
<i>Without formal access</i>	-0,209*** (-3,00)	0,152*** (3,66)	.
<i>time as user</i>	0,00621** (2,39)	0,0101*** (5,63)	0,0121*** (4,24)
<i>Subjective Quality</i>			
<i>service</i>	-0,0133 (-0,15)	-0,103* (-1,69)	-0,0895 (-1,22)
<i>Speed</i>	-0,058 (-0,68)	-0,164*** (-2,60)	-0,1310 (-1,30)
<i>transaction success</i>	0,0033 (0,04)	-0,176*** (-2,58)	-0,214** (-2,16)
<i>security</i>	0,168*** (2,80)	0,0266 (0,46)	0,1380 (1,55)
<i>Ease</i>	0,0605 (0,85)	-0,0324 (-0,60)	-0,0697 (-0,90)
<i>Costs</i>			
<i>cost perception</i>	-0,0875 (-1,32)	0,184*** (4,41)	0,158*** (2,62)
<i>transport costs</i>	-0,00246 (-0,14)	0,0370* (1,91)	0,0703* (1,81)
<i>costs awareness</i>	0,175*** (3,28)	-0,0648 (-1,21)	0,0439 (0,53)
N	221	434	185

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis